

# IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT DI DESA BAYASARI KECAMATAN JATINAGARA KABUPATEN CIAMIS

Suwandi Sastra

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

Email: suwandisastra.exe@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitiannya adalah metode deskriptif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan serta studi lapangan berupa observasi dan wawancara kepada beberapa informan yang dianggap dapat memberikan informasi terkait implementasi program ini, diantaranya 1 orang Kepala Desa, 1 orang Kepala Seksi Pelayanan, 2 orang Kepala Dusun, 1 orang Ketua Rukun Warga dan 3 orang Masyarakat Desa Bayasari, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dimana masih ditemukan hambatan-hambatan baik yang bersumber dari pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan maupun dari masyarakat sebagai objek dari kebijakan tersebut.*

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan, Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat*

## PENDAHULUAN

Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan antara lain menetapkan wabah virus corona sebagai Bencana Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai

Bencana Nasional. Masa penyebaran wabah ini tidak dapat dikendalikan dengan cepat sehingga membutuhkan tindakan penanganan yang tepat baik dari Pemerintah maupun Masyarakat. Salah satu tindakan pencegahan untuk memutus penularan virus tersebut, Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk

daerah-daerah yang termasuk dalam zona merah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kebijakan tersebut cukup berdampak pada kehidupan masyarakat, karena interaksi sosial masyarakat terbatas yang akhirnya membuat aktivitas ekonomi ikut terganggu. Menghadapi kondisi kemunduran ekonomi yang terjadi di masyarakat, selanjutnya Pemerintah mengambil tindakan penanganan dengan mengeluarkan kebijakan keuangan sebagai suatu langkah dalam menghadapi COVID-19. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk mengantisipasi dan mengelola dampak COVID-19 khususnya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19 di Jawa Barat, dijelaskan bahwa ada beberapa program untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat, salah satunya yaitu

Bantuan Tunai dan Non-Tunai. Bantuan ini diberikan kepada Kepala Rumah Tangga Sasaran (KRTS) yang belum mendapatkan Bantuan Tunai atau Bantuan Non-Tunai dari Pemerintah Pusat. Bantuan ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal penyaluran Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Desa Bayasari berperan sebagai implementator. Penyaluran bantuan sosial ini diberikan untuk jangka waktu selama 4 bulan, terhitung mulai bulan April, Mei, Juni dan Juli tahun 2020. Adapun rincian dari bantuan sosial ini yaitu pada Tahap I: Tunai (Rp. 150.000.) dan Non Tunai berupa paket sembako (Beras, Makanan kaleng, Gula, Minyak goreng, Terigu, Vitamin, Mie instan, dan Telur.), kemudian pada Tahap II: Tunai (Rp. 150.000) dan Non Tunai berupa paket sembako (Beras, Makanan kaleng, Gula, Minyak goreng, Terigu, Vitamin, Mie instan, Telur, Susu, dan Masker kain.), dan pada Tahap III Tunai (Rp. 100.000) dan Non Tunai berupa paket sembako (Beras, Makanan kaleng, Gula, Minyak goreng, Terigu, Vitamin, Mie instan, Telur, Susu, Garam dan Masker kain, atau Tas.

Di Desa Bayasari, Jumlah Penerima Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahap I yaitu sebanyak 969 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Tahap II sebanyak 756 KPM dan Tahap III sebanyak 828 KPM. Jika dibandingkan

dengan Desa lainnya di Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis, Desa Bayasari memiliki jumlah penerima paling banyak di setiap tahapnya.

Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Desa Bayasari merupakan Desa dengan jumlah penerima bantuan sosial terbanyak dibandingkan dengan Desa lainnya di Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Namun dalam pelaksanaannya, Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis ini masih ditemukan beberapa permasalahan. Meskipun Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah terlaksana namun maasih belum mencapai substansi implementasi yang efektif. Hal ini terlihat dari adanya indikator permasalahan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan sasaran dari bantuan sosial yang digulirkan oleh Pemerintah selama masa pandemi. Memahami bantuan sosial merupakan hal penting agar masyarakat dapat mengetahui mana yang menjadi hak dan bukan haknya dalam hal sebagai penerima bantuan sosial. Kemudian, masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial tidak mendapatkan bantuan (tidak termasuk dalam KPM), hal ini menyebabkan banyaknya keluhan yang dilakukan warga kepada Pemerintah Desa yang bertugas sebagai

Implementator Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan tersebut serta mencari pemecahan atas permasalahan tersebut dengan judul, “Implementasi Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis”.

Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi program bantuan sosial pemerintah provinsi jawa barat di desa bayasari kecamatan jatinagara kabupaten ciamis?

## **LANDASAN TEORI**

Idealnya suatu kebijakan publik merupakan kebijakan publik yang dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar dinyatakan, kemudian kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (Pasolong, 2008:39) “Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.”

Implementasi merupakan tahapan dalam proses kebijakan publik, biasanya dilaksanakan setelah suatu

kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2008:142) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:

#### 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

#### 2. Sumber Daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik, Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal inipun dapat menjadi penyebab bagi ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindak laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

### 4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana.

Sikap penolakan atau penerimaan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan

permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementator laksanakan adalah kebijakan top down yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

### 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

### 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti kurang lebih selama 9 bulan, terhitung mulai dari Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Juli 2021, bertempat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Variabel yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu model implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara dan observasi. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu 1 orang Kepala Desa, 1 orang Kepala Seksi Pelayanan, 2 orang Kepala Dusun, 1 orang Ketua Rukun Warga dan 3 orang Masyarakat Desa Bayasari, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Teknik analisis data yang dipakai yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

#### **a. Adanya Target atau Hasil yang Diinginkan dari Kebijakan yang Dibuat**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan 8 informan, dapat diketahui bahwa program bantuan telah sampai kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat yang terdampak akibat pandemi, terutama bagi mereka yang dari segi ekonominya dapat dikatakan kurang

mampu. Sementara berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, masih banyak masyarakat yang tidak termasuk dalam keluarga penerima manfaat padahal memenuhi kriteria sebagai salah satu calon penerima bantuan tersebut. Bahkan ditemukan beberapa masyarakat yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan pensiunan mendapatkan bantuan tersebut. Menurut Grindle (Agustino, 2008:139) menyebutkan “Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.”

#### **b. Kebijakan yang Dibuat Memiliki Kesesuaian dengan Kebutuhan Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan 8 informan, dapat diketahui bahwa salah satu indikator telah terpenuhi yakni program ini telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu berdasarkan hasil observasi masyarakat dapat memanfaatkan bantuan yang diperolehnya untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-harinya. Namun bantuan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam waktu kurang lebih dua minggu. Menurut Grindle (Anggara 2014;254) “Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Apabila

kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak, implementasinya akan lebih mudah karena tidak menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.”

Dengan demikian, hasil penelitian indikator-indikator dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan dapat diketahui bahwa Implementasi Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis masih belum optimal, hal ini terlihat dari adanya salah satu indikator yang belum seutuhnya terwujud yaitu tidak tepatnya sasaran dari program bantuan tersebut. Hambatan yang ditemukan yaitu kurangnya ketelitian dari para pelaksana dalam proses pengumpulan data, sehingga berakibat pada sasaran yang tidak tepat.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2008:142) “Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.”

Berdasarkan teori diatas dapat diketahui bahwa tercapainya tujuan dan sasaran dari suatu program mempengaruhi kinerja dari

implementasi program tersebut. Apabila dalam realisasinya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dari program tersebut maka implementasinya belum sepenuhnya dapat dikatakan optimal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang telah dijelaskan diatas yaitu apabila bantuan ini masih berlanjut pada tahap empat, maka para pelaksana akan mengupayakan untuk meningkatkan ketelitian dalam proses penyeleksian data kelompok sasaran, upaya ini pun berlaku bagi bantuan sosial lainnya yang digulirkan selama masa pandemi.

## **2. Sumberdaya**

### **a. Ketersediaan Sumberdaya Manusia**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan 8 informan, dapat diketahui bahwa ketersediaan sumberdaya manusia pada Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis tidak memiliki kendala karena para pelaksana yang mengimplementasikan program ini dirasakan cukup, mulai dari proses pendataan hingga sampai pelaksanaan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Sementara berdasarkan hasil observasi kualitas dari sumberdaya manusia pada Implementasi Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis masih rendah, hal ini terlihat dari pelaksana tingkat

bawah dimana pendataan pada Tahap II dan III seharusnya dilakukan oleh RT/RW namun karena kurang paham dengan teknologi proses penginputan data yang dikirimkan ke pusat dilakukan oleh aparat desa. Menurut Edward III (Agustino, 2008:151) “Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.”

#### **b. Waktu Pelaksanaan**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan 8 informan, dapat diketahui bahwa Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis digulirkan untuk jangka waktu empat bulan, namun dalam hal penyaluran dari pusat sampai ke desa tidak menentu tanggalnya. Hal ini bukan merupakan kesalahan dari para pelaksana di tingkat desa, karena proses distribusi bantuan dilakukan secara terstruktur mulai dari provinsi, kabupaten kemudian menuju desa. Sementara berdasarkan hasil observasi waktu penyaluran bantuan tidak menentu, hal ini dikarenakan distribusi dari pusat memakan waktu yang cukup lama sehingga kedatangan bantuan untuk sampai ke desa sedikit terlambat.

Dengan demikian, hasil penelitian indikator-indikator dari dimensi sumberdaya pada Implementasi Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara

Kabupaten Ciamis memiliki satu indikator yang masih belum optimal, yaitu pada sumberdaya manusia. Hal ini terlihat dari kualitasnya yang masih rendah dalam mengakses teknologi informasi dalam menginput data yang diajukan ke pusat. Hambatan yang ditemukan yaitu tidak adanya agenda bimbingan yang dapat meningkatkan kualitas SDM para pelaksana program yang masih rendah.

Menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2008:142) “Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.”

Berdasarkan teori diatas dapat diketahui bahwa memiliki para pelaksana dengan sumberdaya yang berkualitas merupakan hal yang terpenting dalam menentukan proses implementasi suatu program dapat berjalan dengan optimal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang telah dijelaskan diatas yaitu untuk kedepannya aparat desa berencana untuk mengadakan agenda bimbingan teknologi dalam peningkatan kualitas SDM, yang akan diikuti oleh seluruh perangkat desa hingga RT dan RW serta Karang Taruna Desa.



### **3. Karakteristik Agen Pelaksana**

#### **a. Pembentukan Unit Pelaksana Program**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan 8 informan, dapat diketahui bahwa dalam Implementasi Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis tidak pembentukan suatu unit kerja formal dalam pelaksanaannya, aparat desa hanya bekerjasama dengan PT. Pos membantu proses pelaksanaan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Sementara berdasarkan hasil observasi tidak ada pembentukan tim khusus dalam pengimplementasian Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Menurut Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2008:146) “Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.”

#### **b. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Unit Pelaksana**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan 8 informan, dapat diketahui bahwa dalam Implementasi Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara

Kabupaten Ciamis meskipun tidak membentuk suatu unit kerja yang formal, tetap ada pembagian tugas pokok dan fungsi dari para pelaksana agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Sementara berdasarkan hasil observasi ada pembagian beban kerja pada pengimplementasian Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis, mulai dari petugas pengumpulan data masyarakat, petugas yang memberikan bantuan kepada masyarakat, dan petugas yang menertibkan masyarakat. Menurut John & Mary Miner (Moekijat, 1998:10) mendefinisikan “Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk menapai tujuan tertentu.” sedangkan fungsi menurut Moekijat (1998:13) merupakan “sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu”.

Dengan demikian, hasil penelitian indikator-indikator dari dimensi karakteristik agen pelaksana memiliki satu indikator yang belum optimal, yaitu pada pembentukan unit pelaksanaan program. Hambatan yang ditemukan yaitu tidak adanya pembentukan unit kerja yang mengatur petunjuk-petunjuk dan urutan kepentingan para pelaksana dalam menjalankan tugasnya dalam pengimplementasian Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Van Metter dan

Van Horn (Agustino, 2008:143) ‘Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.’

Dari teori diatas dapat diketahui bahwa pembentukan unit kerja dalam suatu pengimplementasian program menjadi penting, hal ini dikarenakan akan tercantum prosedur teknis pelaksanaan serta tugas pokok dan fungsi para pelaksana dengan jelas, sehingga tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang telah dijelaskan diatas yaitu kedepannya akan membentuk suatu unit kerja sebelum suatu program dilaksanakan dengan cara melakukan technical meeting bagi para pelaksana yang ditugaskan.

#### **4. Sikap Para Agen Pelaksana**

##### **a. Kesiapan Pelaksana dalam Mengerjakan Tugas**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan 8 informan, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis para pelaksana selalu siap dalam menjalankan tugasnya karena itu merupakan tanggungjawab dirinya dan demi kemajuan desa itu sendiri. Sementara berdasarkan hasil observasi para pelaksana memiliki kesiapan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya,

terlihat dari adanya rasa tanggungjawab atas tugas pokok dan fungsinya sebagai pihak pelaksana dari program tersebut.

##### **b. Adanya Keseriusan Pelaksana dalam Melayanai Masyarakat Penerima Bantuan**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan 8 informan, dapat diketahui bahwa sikap para pelaksana dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis bersikap ramah dalam melayani masyarakat, tidak memiliki rasa keterpaksaan dalam menjalankan tugasnya dan bertanggungjawab akan tugas yang diembannya. Sementara berdasarkan hasil observasi para pelaksana memberikan pelayanan sebaik-baiknya, hal ini terlihat dengan keterbukaan para pelaksana dalam menerima keluhan-keluhan masyarakat selama proses penyaluran bantuan tersebut.

Dengan demikian, hasil penelitian indikator-indikator dari dimensi sikap para agen pelaksana dapat dikatakan sudah optimal, hal ini terlihat dari dua indikator yang telah terpenuhi. Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2008:143) menyebutkan “Sikap penolakan atau penerimaan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang

mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.”

Dari teori diatas dapat diketahui bahwa siap atau tidaknya para pelaksana dalam mengimplementasikan program berdampak pada kinerja implementasi dari program tersebut, jika para pelaksana memiliki sikap penlakan pada dirinya (keterpaksaan dalam menjalankan tugasnya) maka akan menghambat proses implementasi program dalam mencapai tujuannya.

## **5. Komunikasi Antar-organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

### **a. Komunikasi Antara Pihak-Pihak yang Terlibat**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan 8 informan, dapat diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan implementator kepada masyarakat terkait Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis hanya sebatas pemberitahuan kepada masyarakat yang menerima bantuan dengan cara memberikan kartu undangan pengambilan bantuan di kantor desa. Sementara berdasarkan hasil observasi komunikasi terkait adanya Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis hanya sebatas pemberitahuan akan diadakannya bantuan sosial tersebut, ketika para pelaksana hendak mengumpulkan persyaratan administratif dari calon keluarga penerima manfaat, tidak ada komunikasi yang spesifik mengenai

sasaran dan tujuan dari program tersebut.

### **b. Kerjasama Antara Pihak-Pihak yang Terlibat**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan 8 informan, dapat diketahui bahwa pihak yang terlibat dalam Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis diantaranya RW, Kepala Dusun, Aparatur Desa, Pos (Tahap I), Ojek Online (Tahap II), Polisi, dan Masyarakat. Sementara berdasarkan hasil observasi pihak yang terlibat dalam Implementasi Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis diantaranya Pemerintah Provinsi, PT. Pos, Aparatur Desa Bayasari, RT/RW, Masyarakat, dan Polisi. Menurut Pamudji (1985:12) “Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara lebih untuk mencapai tujuan bersama.”

Dengan demikian, hasil penelitian indikator-indikator dari dimensi komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dapat diketahui bahwa pada Implementasi Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis masih kurang optimal, hal ini terlihat dari tidak adanya komunikasi antara para pelaksana dengan masyarakat terkait tujuan dan sasaran dari bantuan tersebut, sehingga

menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat yang tidak termasuk dalam kriteria penerima bantuan tetap menerima bantuan tersebut. Hambatan yang ditemukan yaitu kurangnya kejelasan informasi yang disampaikan para pelaksana mengenai bantuan tersebut kepada masyarakat.

Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2008:144) menyebutkan “Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.”

Dari teori diatas dapat diketahui bahwa untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam mencapai tujuan dari suatu program, maka hendaknya dilakukan komunikasi yang baik dan jelas diantara pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang telah dijelaskan diatas yaitu, untuk kedepannya akan dilakukan sosialisasi terkait program bantuan apapun yang digulirkan pemerintah untuk kepentingan masyarakat, hal ini bertujuan meminimalisir keluhan-keluhan masyarakat serta agar tujuan tersebut mancapai kelompok sasaran yang tepat.

## **6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

### **a. Kondisi Ekonomi di Lingkungan Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan 8 informan, dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat di masa pandemi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi, hal ini dikarenakan adanya kebijakan pembatasan sosial yang memaksa para pelaku usaha kehilangan konsumennya. Sementara berdasarkan hasil observasi kegiatan ekonomi masyarakat mengalami kendala, hal ini dampak daripada kebijakan pembatasan sosial yang diterbitkan oleh pemerintah.

### **b. Kondisi Sosial di Lingkungan Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan 8 informan, dapat diketahui bahwa kondisi sosial di masyarakat saat pandemi sangat minim akan kegiatan interaksi sosial, hal ini diakibatkan adanya kebijakan pembatasan sosial dalam usaha memutus penyebaran covid-19, masyarakat dihimbau untuk memulai kebiasaan baru dengan ikut mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Sementara berdasarkan hasil observasi, menurunnya berbagai aktivitas sosial turut mempengaruhi ekonomi masyarakat, hal ini terlihat dari banyaknya buruh rantau yang terpaksa diberhentikan kerjanya dan menjadi pengangguran ketika pulang kampung.

Dengan demikian, hasil penelitian indikator-indikator dari dimensi lingkungan ekonomi, sosial dan politik dapat diketahui bahwa di Desa Bayasari dalam keadaan kurang kondusif, hambatan yaitu menurunnya pendapatan harian masyarakat, oleh karena itu ketika digulirkan program bantuan sosial yang akan turut serta membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, mereka akan saling berebut untuk mendapatkan bantuan tersebut yang berimbas pada pengimplementasian program yang tidak tepat sarannya. Hambatan selanjutnya yaitu dengan adanya kebijakan pembatasan sosial yang diterbitkan pemerintah maka mau tidak mau masyarakat pun harus menjalankannya, hal ini tentu mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan penjelasan diatas, Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2008:144) “Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.”

Dari teori diatas dapat diketahui bahwa keadaan lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari tidak optimalnya pengimplementasian suatu program, sehingga tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh program tidak berjalan secara efektif.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang telah dijelaskan diatas yaitu para pelaksana beserta masyarakat dapat memanfaatkan program-program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah dengan efektif untuk membantu menangani kondisi krisis ekonomi yang terjadi di masa pandemi ini. Kemudian upaya selanjutnya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang telah dijelaskan diatas yaitu dengan memperketat dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya penyebaran covid-19, kemudian menghibau masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru, dengan menerapkan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah dalam kehidupan sehari-harinya, hal ini bertujuan agar pandemi segera berlalu sehingga aktivitas sosial dan ekonomi akan kembali pulih.

## **KESIMPULAN**

### **1. Kesimpulan**

Implementasi Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jat nagara Kabupaten Ciamis dapat dikatakan belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terdapat beberapa hambatan yaitu: Kurangnya ketelitian dari para pelaksana dalam proses pengumpulan data, tidak adanya agenda bimbingan yang dapat meningkatkan kualitas SDM para pelaksana program yang masih rendah, tidak adanya pembentukan unit kerja

yang mengatur petunjuk-petunjuk dan urutan kepentingan para pelaksana dalam menjalankan tugasnya, kurangnya kejelasan informasi yang disampaikan para pelaksana mengenai bantuan tersebut kepada masyarakat, terjadi krisis ekonomi yang terlihat dari menurunnya pendapatan harian masyarakat dan adanya kebijakan pembatasan sosial yang diterbitkan pemerintah yang turut mempengaruhi ekonomi masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu para pelaksana berupaya untuk meningkatkan ketelitian dalam proses penyeleksian data kelompok sasaran, mengadakan agenda bimbingan teknologi dalam peningkatan kualitas SDM, untuk kedepannya akan membentuk suatu unit kerja sebelum suatu program dilaksanakan dengan cara melakukan technical meeting bagi para pelaksana yang ditugaskan, melakukan sosialisasi terkait program bantuan yang digulirkan pemerintah, para pelaksana beserta masyarakat dapat memanfaatkan program-program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah dengan efektif untuk membantu menangani kondisi krisis ekonomi yang terjadi di masa pandemi ini; dan Mengurangi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya penyebaran covid-19, kemudian menghimbau masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru, dengan menerapkan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah dalam kehidupan sehari-

harinya, hal ini bertujuan agar pandemi segera berlalu sehingga aktivitas sosial dan ekonomi akan kembali pulih.

## **2. Saran**

Untuk dapat mengoptimalkan Implementasi Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis harus ada kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut. Supaya hambatan-hambatan yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis dapat diminimalisir maka implementator disarankan melakukan penyaringan terhadap data-data keluarga penerima manfaat untuk menyeleksi siapa yang berhak menerima bantuan sehingga program tersebut dapat mencapai tujuan dan sasarnya, meningkatkan kualitas sumberdaya para pelaksana, membentuk suatu unit kerja agar implementasi program dapat berjalan efektif dan efisien, melakukan sosialisasi mengenai program bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah di masa pandemi agar masyarakat dapat memahami tujuan dan sasaran dari program bantuan sosial tersebut, menangani kondisi krisis ekonomi masyarakat yang terjadi di masa pandemi ini, dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan serta menerapkan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Selain upaya-

upaya yang telah dilakukan, untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis maka pemerintah desa disarankan untuk dapat mengoptimalkan program-program bantuan sosial yang bertujuan membantu masyarakat di masa yang akan datang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Moekijat. 1998. *Analisis Jabatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Pamudji, S. 1985. *Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta

#### **Dokumen**

- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19 di Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19 di Jawa Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).